

## **EVALUASI EFEKTIVITAS PENYULUHAN ANTI KORUPSI**

**Bunga Yuliawati**  
[bungayuliawati0@gmail.com](mailto:bungayuliawati0@gmail.com)  
**Poltekkes Kemenkes Riau**

### **1. PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan struktural yang berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi, stabilitas politik, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, praktik korupsi masih menjadi tantangan serius meskipun berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu strategi preventif yang terus dikembangkan adalah penyuluhan anti korupsi, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap bahaya korupsi. Namun demikian, efektivitas program penyuluhan tersebut masih perlu dikaji secara sistematis untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar mampu mengubah perilaku dan budaya masyarakat.

Berdasarkan konteks tersebut, rumusan masalah dalam esai ini adalah: sejauh mana penyuluhan anti korupsi efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya? Selain itu, pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana metode penyuluhan yang digunakan dapat dioptimalkan agar memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perubahan sikap dan perilaku anti korupsi.

Tujuan penulisan esai ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan anti korupsi berdasarkan kajian literatur ilmiah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas program penyuluhan di masa mendatang. Dengan demikian, esai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya pencegahan korupsi.

Tesis utama dalam esai ini adalah bahwa penyuluhan anti korupsi memiliki potensi yang signifikan dalam membangun budaya integritas, namun efektivitasnya sangat bergantung pada metode penyampaian, partisipasi audiens, serta dukungan lingkungan sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa program penyuluhan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Topik ini penting dan relevan untuk dikaji karena korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Evaluasi terhadap efektivitas penyuluhan anti korupsi menjadi krusial untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam program tersebut memberikan hasil yang optimal. Selain itu, dalam era globalisasi dan transparansi informasi, upaya pencegahan korupsi berbasis edukasi masyarakat menjadi semakin penting sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI**

### **2.1. Konsep Utama**

Penyuluhan anti korupsi merupakan suatu proses edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap bahaya dan dampak korupsi. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui berbagai metode seperti sosialisasi, seminar, pelatihan, maupun kampanye publik yang diselenggarakan oleh lembaga terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk membentuk nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi dalam masyarakat.

Efektivitas dalam konteks program penyuluhan merujuk pada sejauh mana kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas penyuluhan anti korupsi dapat diukur melalui peningkatan pengetahuan peserta, perubahan sikap terhadap praktik korupsi, serta perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari keberlanjutan dampak yang dihasilkan, apakah perubahan yang terjadi bersifat sementara atau mampu bertahan dalam jangka panjang.

Korupsi sendiri merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Transparency International, yang menyatakan bahwa korupsi mencakup berbagai bentuk seperti suap, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme. Korupsi memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat pembangunan ekonomi, serta memperbesar ketimpangan sosial.

Dalam konteks penyuluhan, perubahan perilaku menjadi tujuan utama yang ingin dicapai. Perubahan perilaku tidak hanya mencakup peningkatan pengetahuan, tetapi juga transformasi sikap dan tindakan individu dalam menolak segala bentuk korupsi. Proses ini bersifat bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, budaya, serta sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan penyuluhan sangat bergantung pada kemampuan program dalam mempengaruhi ketiga aspek tersebut secara simultan.

## **2.2. Teori Pendukung**

Dalam menganalisis efektivitas penyuluhan anti korupsi, beberapa teori digunakan sebagai landasan konseptual. Salah satu teori yang relevan adalah teori perubahan perilaku yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku individu terjadi melalui tahapan tertentu, mulai dari kesadaran, pemahaman, pembentukan sikap, hingga akhirnya tindakan. Dalam konteks ini, penyuluhan anti korupsi berperan penting dalam membangun kesadaran awal dan memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi, yang kemudian diharapkan berkembang menjadi sikap dan perilaku yang berintegritas.

Selain itu, Social Learning Theory juga menjadi landasan penting dalam memahami proses pembelajaran dalam penyuluhan. Teori ini menyatakan bahwa individu belajar melalui observasi dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan penyuluhan, peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga belajar dari contoh perilaku yang ditampilkan oleh narasumber maupun melalui studi kasus yang disampaikan. Hal ini memungkinkan terjadinya internalisasi nilai-nilai anti korupsi secara lebih efektif.

Teori komunikasi persuasif juga memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana pesan dalam penyuluhan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku peserta. Keberhasilan penyuluhan sangat bergantung pada bagaimana pesan disampaikan, termasuk kejelasan, relevansi, serta kemampuan pesan tersebut dalam menyentuh aspek emosional dan rasional audiens. Dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat, penyuluhan dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas pesan yang disampaikan.

Selanjutnya, teori evaluasi program memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menilai keberhasilan suatu program. Model evaluasi seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap berbagai aspek program, mulai dari perencanaan hingga hasil yang dicapai. Dalam penelitian ini, teori evaluasi program digunakan untuk mengukur efektivitas penyuluhan anti korupsi secara objektif dan menyeluruh.

### **2.3. Penelitian Relevan**

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pendidikan dan penyuluhan anti korupsi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun dampaknya terhadap perubahan perilaku seringkali tidak terjadi secara instan. Penelitian yang dilakukan oleh Susan Rose-Ackerman (1999) menunjukkan bahwa edukasi anti korupsi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya korupsi, namun perubahan perilaku memerlukan dukungan dari sistem kelembagaan yang kuat.

Selain itu, Robert Klitgaard (2000) mengemukakan bahwa korupsi dipengaruhi oleh faktor struktural seperti monopoli kekuasaan, tingkat diskresi, dan rendahnya akuntabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan anti korupsi perlu didukung oleh reformasi sistemik agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.

Laporan dari World Bank (2016) juga menegaskan bahwa program edukasi anti korupsi akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan kebijakan transparansi dan akuntabilitas publik. Program yang berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan cenderung memiliki dampak yang terbatas terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Di Indonesia, berbagai program penyuluhan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai korupsi. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa perubahan perilaku jangka panjang masih menjadi tantangan utama, terutama karena pengaruh faktor budaya dan lingkungan sosial yang kuat.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan anti korupsi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat, tetapi efektivitasnya dalam mengubah perilaku sangat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sistem hukum, budaya, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan fokus pada evaluasi efektivitas penyuluhan secara lebih mendalam, khususnya dalam mengukur perubahan sikap dan perilaku peserta setelah mengikuti program penyuluhan.

### **3. PEMBAHASAN / ANALISIS**

#### **3.1. Analisis Bagian Pertama: Efektivitas Penyuluhan Anti Korupsi dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran**

Penyuluhan anti korupsi merupakan pendekatan preventif yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat terhadap bahaya korupsi. Berdasarkan penelitian oleh Syauket et al. (2022), kegiatan penyuluhan di lingkungan sekolah terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak korupsi serta pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam kegiatan penyuluhan dinilai efektif dalam membentuk pola pikir dan sikap antikorupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang kerugian negara dan dampak sosial korupsi, sehingga berkontribusi pada pencegahan perilaku koruptif.

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan pendekatan behavioral change theory, di mana peningkatan pengetahuan merupakan tahap awal dalam perubahan sikap dan perilaku. Penyuluhan berfungsi sebagai media transfer nilai (value transmission) yang menanamkan norma integritas kepada individu. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan anti korupsi efektif pada tahap kognitif dan afektif, terutama dalam meningkatkan awareness masyarakat.

### **3.2. Analisis Bagian Kedua: Keterbatasan Efektivitas Penyuluhan dalam Mengubah Perilaku**

Meskipun penyuluhan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, efektivitasnya dalam mengubah perilaku nyata masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh faktor struktural dan budaya yang lebih kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada edukasi, tetapi juga pada sistem hukum dan kelembagaan. Maulana (2024) menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas upaya anti korupsi.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pelaku korupsi seringkali tidak jera karena sanksi yang dianggap ringan dan masih dapat menikmati hasil korupsi. Kondisi ini menyebabkan penyuluhan kehilangan daya tekan (deterrent effect) karena tidak didukung oleh sistem hukum yang kuat. Dalam perspektif teori structural-functionalism, perubahan perilaku tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga oleh sistem sosial yang mendukungnya. Artinya, penyuluhan anti korupsi akan kurang efektif jika tidak diiringi dengan reformasi institusi, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas.

Dengan demikian, penyuluhan hanya berperan sebagai salah satu instrumen pencegahan, namun tidak cukup untuk menghasilkan perubahan perilaku secara signifikan tanpa dukungan sistemik.

### **3.3. Analisis Bagian Ketiga: Integrasi Penyuluhan dengan Pendidikan Karakter dan Partisipasi Sosial**

Untuk meningkatkan efektivitas, penyuluhan anti korupsi perlu diintegrasikan dengan pendidikan karakter dan partisipasi masyarakat. Penelitian Widyaningrum et al. (2020) menunjukkan bahwa penyuluhan yang dikombinasikan dengan pendidikan karakter mampu membentuk perilaku jujur dan tanggung jawab pada peserta didik.

Lebih lanjut, program edukasi yang berkelanjutan sejak usia dini terbukti dapat membangun generasi yang memiliki kesadaran anti korupsi yang kuat. Faisol

(2024) menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi sejak dini mampu membentuk karakter moral dan meningkatkan kemampuan individu dalam mengidentifikasi serta menolak praktik korupsi.

Selain aspek pendidikan, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci. Penyuluhan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan memperkuat kontrol sosial terhadap praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan konsep social control theory, di mana norma sosial dan pengawasan kolektif dapat mencegah perilaku menyimpang. Dengan demikian, efektivitas penyuluhan anti korupsi akan meningkat apabila:

1. Dilakukan secara berkelanjutan,
2. Terintegrasi dalam sistem pendidikan formal dan non-formal,
3. Didukung oleh partisipasi masyarakat, dan
4. Disinergikan dengan penegakan hukum yang kuat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan anti korupsi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta dampak korupsi. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa penyuluhan efektif pada aspek kognitif dan afektif, yaitu dalam membentuk pemahaman dan sikap anti korupsi. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku secara nyata dan berkelanjutan.

Temuan utama dari analisis menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain metode penyampaian, tingkat partisipasi peserta, serta dukungan lingkungan sosial dan kelembagaan. Penyuluhan yang bersifat satu arah dan tidak berkelanjutan cenderung memiliki dampak yang terbatas. Selain itu, lemahnya penegakan hukum, budaya permisif terhadap korupsi, serta kurangnya integrasi dengan sistem pendidikan menjadi faktor yang menghambat perubahan perilaku masyarakat. Sebaliknya, penyuluhan yang terintegrasi dengan pendidikan karakter, dilakukan secara berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat terbukti lebih efektif dalam membangun budaya integritas.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan anti korupsi perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dan sistematis. Untuk praktik ke depan, program penyuluhan sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mengedepankan pendekatan partisipatif, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Selain itu, diperlukan sinergi antara program edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta kebijakan transparansi dan akuntabilitas publik agar dampak yang dihasilkan lebih signifikan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi empiris dengan metode kuantitatif maupun campuran (mixed methods) guna mengukur secara lebih objektif perubahan perilaku pasca penyuluhan. Penelitian juga dapat difokuskan pada evaluasi jangka panjang serta pengembangan model penyuluhan yang inovatif dan berbasis teknologi digital. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi melalui penyuluhan dapat menjadi lebih efektif dalam membentuk masyarakat yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Djarmiko, M. (2024). Efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*. <https://doi.org/10.31599/6ch24g80>
- Faisol. (2024). Pendidikan anti korupsi bagi generasi muda sebagai upaya pencegahan korupsi sejak dini. *Faedah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.59024/faedah.v2i3.998>
- Gorsira, M., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Both sides of the coin: Motives for corruption among public officials and business employees. *Journal of Business Ethics*, 151(1), 179–194. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3219-2>
- McAlister, A. L., Perry, C. L., & Parcel, G. S. (2008). How individuals, environments, and health behaviors interact: Social cognitive theory. Dalam K. Glanz, B. K. Rimer, & K. Viswanath (Eds.), *Health behavior and health education: Theory, research, and practice* (hlm. 169–188). Jossey-Bass. <https://doi.org/10.1002/9780470753552.ch8>
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anti-corruption reforms fail: Systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass. <https://doi.org/10.1002/9781119171386>

Syauket, A., Karsono, B., & Bangun, M. F. A. (2022). Penyuluhan: Upaya penguatan perilaku anti korupsi di lingkungan SMA Bekasi. <https://doi.org/10.31599/2d75xn89>

Widyaningrum, H., Rohman, A. N., Sugeng, S., & Putri, E. A. (2020). Pendidikan anti korupsi bagi pelajar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 3(1). <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v3i1.53>